



**PEMERINTAH
KABUPATEN KARANGANYAR**

**LAPORAN
PELAKSANAAN
TUGAS**

LPT 2023

**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



**LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS
TAHUN 2023**

Gedung B Lt. 1 Komplek Perkantoran Setda Kab. Karanganyar
Jl. Lawu No.385 B Karanganyar No.Telp (0271) 495039,Faks (0271) 495590
Website : www.karanganyarkab.go.id E-mail : kominfo@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, karena kami dapat menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Tahun 2023. Laporan ini secara garis besar berisi pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar.

Dalam penyusunan LPT ini kami menyadari bahwa laporan ini masih belum sempurna, oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi perbaikan untuk menyempurnakan penyusunan LPT Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar di tahun mendatang.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LPT Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 ini, kami sampaikan terima kasih, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan kita dan memberikan rahmat-Nya. Amin.

Akhir kata, semoga LPT ini dapat bermanfaat bagi kita semua terutama dalam evaluasi pelaksanaan tugas sesuai tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar.

Karanganyar, Desember 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



ISNAN NUR AZIZ, S.Kom

Pembina

NIP. 19780210 200501 1 016

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum	1
C. Maksud dan Tujuan	2
BAB II Deskripsi OPD	3
A. Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar	3
B. Standard Operating Procedure (SOP)	3
C. Perda/Perbub Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Program Dan Kegiatan	3
D. Struktur Organisasi	5
E. Kepegawaian Berdasarkan Urusan Yang Dilaksanakan....	7
BAB III Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	10
A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar	10
B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	10
C. Urusan Pilihan.....	17
D. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	17
BAB IV Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah.....	18
A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.....	18
B. Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar ...	23
C. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	23
D. Urusan Pemerintahan Pilihan	34
E. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	34

F.	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	34
G.	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	34
H.	Unsur Kewilayahan	34
I.	Unsur Pemerintahan Umum.....	34
J.	Unsur Kekhususan.....	34
BAB V	Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Dan Penugasan	35
BAB VI	Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	36
BAB VII	Inovasi Dan Penghargaan	37
A.	Inovasi	37
B.	Penghargaan	38
BAB VIII	Penutup	39
A.	Kesimpulan	39
B.	Saran	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar dan sesuai dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika, adalah Dinas Komunikasi dan Informatika selanjutnya disingkat Diskominfo adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian di Daerah.

B. Dasar Hukum

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar dalam hal ini berkewajiban menyajikan Laporan Pelaksanaan Tugas pada tahun 2021.

Dasar hukum penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas ini adalah :

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : UUD Tahun 1945
3. Landasan Struktural : Undang-Undang No 23 Tahun 2014
4. Landasan Operasional :
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah .Kabupaten Karanganyar.

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- c. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika.
- d. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- e. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- f. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika.
- g. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023.

C. Maksud Dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan laporan pencapaian program dan kegiatan SKPD/OPD yang didasarkan pada Rencana Kerja Tahunan tahun 2023. LPT bertujuan menginformasikan pencapaian indikator tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika yang berkaitan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta program kegiatan untuk mempertanggungjawabkan dan menjelaskan capaian program kerja selama 1 (satu) tahun anggaran mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2023. Pada tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar melaksanakan program dan kegiatan sebanyak 5 Program, yang dijabarkan dalam 10 Kegiatan dan 36 Sub Kegiatan.

BAB II

DESKRIPSI SKPD/OPD

A. Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar.

Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika, adalah

”Dinas Komunikasi dan Informatika selanjutnya disingkat Diskominfo adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian di Daerah”.

B. STANDART OPERATING PROCEDURE (SOP) OPD (Organisasi Perangkat Daerah)

SOP kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar

- Terlampir -

C. PERDA/ PERBUP TERKAIT PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN.

1. Peraturan Daerah

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar.

- c. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar.
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 20 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2. Peraturan Bupati

- a. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 18 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- b. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.
- c. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
- d. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
- e. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 12 Tahun 2020 tentang Satu Data Daerah.
- f. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 96 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Telekomunikasi Pasif,
- g. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 96 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Telekomunikasi Pasif.
- h. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika.

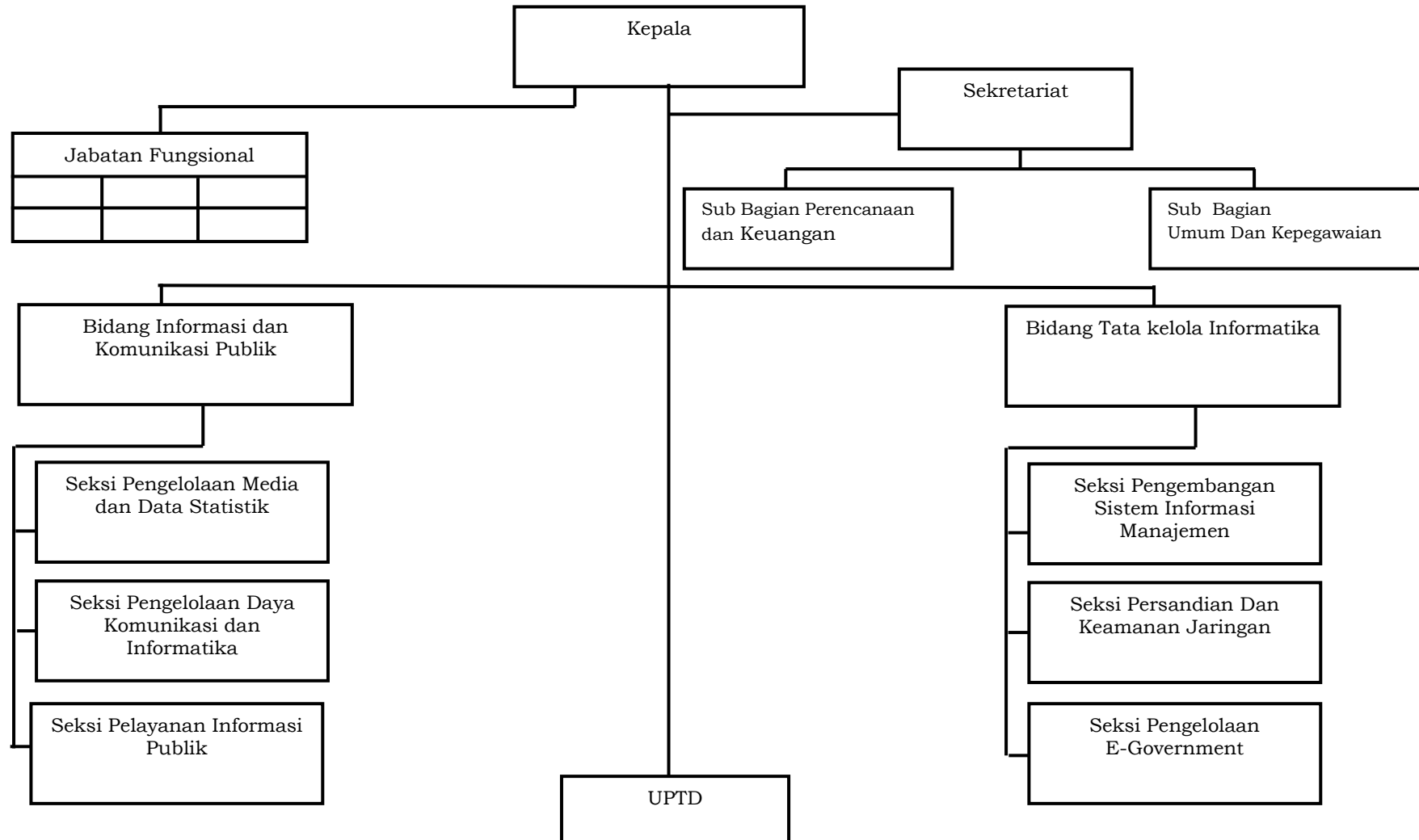
- i. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar

D. STRUKTUR ORGANISASI.

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar sesuai dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 111 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika.

Adapun Bagan Susunan Organisasi sebagai berikut :

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



E. KEPEGAWAIAN BERDASARKAN URUSAN YANG DILAKSANAKAN.

1. Daftar Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar

NO	NAMA	NIP	JABATAN	STATUS KEPEG. (PNS/CPNS)	PANGKAT/GOL
1	Isnain Nur Aziz, S.Kom.	19780210 200501 1 016	Kepala Dinas	PNS	Pembina (IV/a)
➤ SEKRETARIAT					
2	Bambang Siswanto Nugroho, S.I.P., M.H.	19700618 199803 1 002	Sekretaris	PNS	Pembina
3	Tardi Wartono, S.Sos.	19660402 198912 1 001	Kepala Sub Bagian Umum	PNS	Penata Tingkat I (III/d)
4	Wahyono, S.H.	19690417 199303 1 007	Perencana Ahli Muda	PNS	Penata Tingkat I (III/d)
5	Endang Werdiningsih, S.Sos.	19711210 199403 2 002	Bendahara	PNS	Penata Tingkat I (III/d)
6	Nur Pratiwi Widyaningsih, S.E.	19851124 201001 2 022	Penata Laporan Keuangan	PNS	Penata Tingkat I (III/d)
7	Wakidi, S.Sos.	19680415 199203 1 011	Pengelola Sarana Dan Prasarana Kantor	PNS	Penata Tingkat I (III/d)
8	Wiranti, S.E.	19790227 200902 2 009	Penata Laporan Keuangan	PNS	Penata Muda Tingkat I (III/b)
9	Kuswandanu Kusuma Wicaksana, S.Kom.	19911031 202012 1 005	Analisis Data Dan Informasi	PNS	Penata Muda (III/a)
10	Rm Helmy Ary Respati	19790830 201001 1 003	Pengelola Kepegawaian	PNS	Pengatur Tingkat I (II/d)
11	Sukarsi	19661229 200701 2 007	Petugas Keamanan	PNS	Pengatur Tingkat I (II/d)
12	Sri Ijaswati	19670905 200701 2 021	Pengadministrasi Sarana Dan Prasarana	PNS	Pengatur Tingkat I (II/d)
13	Suparjo	19770217 200902 1 003	Pramu Bakti	PNS	Juru Tingkat I (I/d)
➤ BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					
14	Arip Purwanto, S.S.T.P., M.Si.	19860919 200602 1 002	Kepala Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik	PNS	Penata Tingkat I (III/d)
15	Sopiyatun, S.Sos., M.I.Kom.	19780312 200604 2 008	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	PNS	Pembina (IV/a)
16	Anasta Novi Hidayati, S.Sos.	19841101 200902 2 007	Pengendali Jaringan Komunikasi	PNS	Penata Tingkat I (III/d)

NO	NAMA	NIP	JABATAN	STATUS KEPEG. (PNS/CPNS)	PANGKAT/GOL
17	Mulyono, S.S.T.	19721209 200701 1 012	Analisis Konten Media Sosial	PNS	Penata Muda Tingkat I (III/b)
18	Sri Yanto	19820927 200902 1 008	Pengelola Penyelenggaraan Media Elektronik	PNS	Pengatur Tingkat I (II/d)
19	Yuni Kartikawati	19710529 200701 2 008	Operator Radio	PNS	Pengatur Tingkat I (II/d)
20	Mami Suparyatmi, S.E.	19660503 200701 2 010	Kepala Seksi Pengelolaan Media Dan Data Statistik	PNS	Penata Muda Tingkat I (III/b)
21	Raden Puji Suryani, S.Sos.	19670502 199303 2 008	Analisis Berita	PNS	Penata Tingkat I (III/d)
22	Kristiana Dwi Kartiningsih, S.S., M.M.	19690421 199803 2 009	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	PNS	Pembina (IV/a)
23	Indah Sulistiawati Effendhi, S.Sos.	19830211 201001 2 023	Calon Pranata Humas	PNS	Penata (III/c)
24	Tri Andani Kurnia Dewi, A.Md.	19820308 201001 2 021	Calon Pranata Humas	PNS	Penata Muda (III/a)
25	Nur Riyana Fitrianti, A.Md.	19820722 201001 2 026	Calon Pranata Humas	PNS	Penata Muda (III/a)
➤ BIDANG TATAKELOLA INFORMATIKA					
26	EKO SUPRIYADI, S.S., M.Eng.	19770915 200501 1 007	Kepala Bidang Tatakelola Informatika	PNS	Pembina (IV/a)
27	Agus Romadhoni, S.Kom.	19790816 200902 1 003	Pranata Komputer Ahli Muda	PNS	Penata Tingkat I (III/d)
28	Surya Adi Kusuma, S.Kom.	19830515 201001 1 029	Pranata Komputer Muda	PNS	Penata Tingkat I (III/d)
29	Adi Yudha Prahara, S.Kom.	19840622 201001 1 021	Pranata Komputer Ahli Muda	PNS	Penata (III/c)
30	Hanif Puspitasari, S.Kom.	19820831 201001 2 028	Pranata Komputer Ahli Muda	PNS	Penata (III/c)
31	Sri Setyowati, S.E.	19800211 201001 2 014	Pranata Komputer Mahir	PNS	Penata Muda (III/a)
32	Hanif Setyo Wibowo, S.Kom., M.M.	19840914 200902 1 003	Kepala Seksi Persandian Dan Keamanan Jaringan	PNS	Penata Tingkat I (III/d)
33	Achilleus Rino Bitakmo, S.Kom.	19810512 200604 1 015	Pemeriksa Teknologi Informasi	PNS	Penata Tingkat I (III/d)
34	Priyo Pinardi, S.Kom.	19840510 201101 1 012	Pengawas Teknologi Informasi	PNS	Penata Muda (III/a)
35	Suparno.	19731103 199803 1 012	Analisis Sistem Informasi Dan Diseminasi Hukum	PNS	Penata Muda (III/a)

NO	NAMA	NIP	JABATAN	STATUS KEPEG. (PNS/CPNS)	PANGKAT/GOL
36	Wahyu Sanyoto, A.Md.	19850312 201903 1 004	Penyusun Progran Anggaran Dan Pelaporan	PNS	Pengatur (II/c)
37	Danang Rahadiansyah Arunadi, A.Md.	19870820 201903 1 005	Pengelola Sistem Dan Jaringan	PNS	Pengatur (II/c)
38	Ibnu Syahri, A.Md	19990215 202012 1 004	Calon Sandiman	PNS	Pengatur (II/c)
39	Febri Sutrisno	19980205 202321 1 005		PPPK	IX
40	Ria Astiyaningsih	19870429 202321 2 031		PPPK	IX
41	Yahya Fathoni Amri	19901204 202321 1 014		PPPK	IX

BAB III

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Nihil

B. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

1. Komunikasi dan Informatika

No	IKK Output dan Capaian Kinerja	IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja	
1	1. Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100,00 % Ket.: 42/42 x 100 % = 100 %	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo ----- x 100% Jumlah OPD	Pembilang = 42.00 opd Penyebut = 42.00 opd Hasil = 100,00
	2. Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	100,00 % Ket.: 42/42 x 100 % = 100 %			
	3. Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	8,00 sistem elektronik Ket.:			

2	1.	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	100,00 % Ket.: 12/12 x 100 % = 100 %	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi ----- x 100% Jumlah Layanan Publik	100,00 % Ket. : 37/37 x 100 % = 100 %
	2.	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	100,00 % Ket.: 42/42 x 100 % = 100 %			
	3.	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	38,09 % Ket.: 16/42 x 100 % = 38.09 %			
	4.	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah implementasikan secara elektronik	100,00 % Ket.: 168/168 x 100 % = 100 %			
	5.	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan)	100,00 % Ket.:			

	yang memanfaatkan sertifikat elektronik	168/168 x 100 % = 92%
6.	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	69,64 % Ket.: 117/168x 100 % = 69.64 %
7.	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	100,00 % Ket.: 168/168 x 100 % = 100 %
8.	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	100,00 % Ket.: 42/42 x 100 % = 100 %
9.	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	100,00 % Ket.: 42/42 x 100 % = 100 %
10.	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	100,00 % Ket.: 42/42 x 100 % = 100 %
11.	Persentase data yang dapat	100,00 %

		berbagi pakai	Ket.: 24.104/24. 104 x 100% = 100 %			
	12.	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	100,00 % Ket.: 42/42 x 100 % = 100 %			
	13.	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	100,00 % Ket.: 16/16 x 100 % = 100 %			
	14.	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	5,00 Peraturan Ket.:			
3	1.	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/ kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	85,59 % Ket.: 95/111 x 100 % = 85.59	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/ kota ----- x 100% Jumlah penduduk	68,95 % Ket. : 653209/947 167 x 100 % = 68.96 %
	2.	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/	96,88 % Ket.: = 31/32 x			

	kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	100 % = 96,88		
3.	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	93,02 % Ket.: =40/43 x 100 %		

2. Statistik

No	IKK Output dan Capaian Kinerja	IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja
1	1. Tersedianya buku profil daerah	2,00 buku Ket.: Kabupaten Karanganyar dalam angka, kecamatan dalam angka	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah $\frac{\text{Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	100,00 % Ket. : 42/42 x 100% = 100 %
	2. Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	46,00 opd Ket.:		
	3. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	46,00 opd Ket.:		
	3. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	46,00 opd Ket.:		

3.	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	46,00 opd Ket.:		
3.	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	46,00 opd Ket.:		
4.	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	46,00 opd Ket.:		
5.	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	100,00 % Ket.: $17/17 \times 100 \% = 100 \%$		
6.	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	100,00 % Ket.: $17/17 \times 100 \% = 100 \%$		
7.	Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	100,00 % Ket.: $17/17 \times 100 \% = 100 \%$		
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah ----- x 100%	100,00 % Ket. : 42/42 x 100

			Jumlah OPD	% = 100 %
--	--	--	------------	-----------

3. Persandian

No	IKK Output dan Capaian Kinerja		IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja	
1	1.	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	100,00 % Ket.: 0/0 x 100 % = 100 %	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi ----- x 100% Jumlah area penilaian	0,62 Ket. : 572 / 918
	2.	Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	15,68 % Ket.: 8/51 x 100 % =15.68 %			
	3.	Persentase sistem elektronik/ asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	11,76 % Ket.: 8/51 x 100 % = 11.76 %			
	4.	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola	100,00 % Ket.: 42/42 x 100 % =			

	Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	100 %			
--	--	-------	--	--	--

C. URUSAN PILIHAN*Nihil***D. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG***Nihil*

BAB IV

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

	URUSAN PEMERINTAHAN	KBJK STRA.	PROGRAM DAN KEGIATAN	URAIAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		a PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Anggaran: Rp. 9.782.900,00 Realisasi: Rp. 9.782.900,00 Persentase: (100,00%)	tersedianya lap. capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja skpd 12 bulan	12 bulan (100.00%)		
			b PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA,	1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Anggaran: Rp. 46.452.000,00 Realisasi: Rp. 41.332.000,00	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD dan koordinasi penyusunan	12 Bulan (100.00%)		

			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase: (88,98%)	laporan keuangan 12 Bulan			
				2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Anggaran: Rp. 304.834.800,00 Realisasi: Rp. 296.175.500,00 Persentase: (97,16%)	tersedianya jml dokumentasi hasil penyediaan adm pelaksanaan tugas asn 12 bulan	12 bulan (100.00%)		
		c	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Anggaran: Rp. 24.930.000,00 Realisasi: Rp. 24.900.000,00 Persentase: (99,88%)	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 12 Bulan	12 Bulan (100.00%)		
				2) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Anggaran: Rp. 50.145.200,00 Realisasi: Rp. 50.144.800,00 Persentase:	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan	12 Bulan (100.00%)		

			(100,00%)				
		d	PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH K ABUPATEN/ KOTA, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Anggaran: Rp. 4.596.194.795,00 Realisasi: Rp. 4.161.503.455,00 Persentase: (90,54%)	terpenuhinya gaji asn 100 %	100 % (100.00%)	
		e	PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH K ABUPATEN/ KOTA, Kegiatan Pe meliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Anggaran: Rp. 180.386.400,00 Realisasi: Rp. 172.607.500,00 Persentase: (95,69%)	Tersedianya Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 12 Bulan	12 Bulan (100.00%)	
		f.	PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT	1) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Anggaran: Rp. 17.700.000,00	Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan dan	12 Bulan (100.00%)	

			AHAN DAERAH K ABUPATEN/ KOTA, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	Realisasi: Rp. 13.220.000,00 Persentase: (74,69%)	perlengkapan kantor ac 17, PC/laptop 25, Printer 8 12 Bulan		
				2) Penyediaan Jasa Surat Menyurat Anggaran: Rp. 5.000.000,00 Realisasi: Rp. 5.000.000,00 Persentase: (100,00%)	Terkirimnya dan tercukupinya jasa surat menyurat 12 Bulan	12 Bulan (100.00%)	
			g PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH K ABUPATEN/ KOTA, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Anggaran: Rp. 15.000.000,00 Realisasi: Rp. 14.860.500,00 Persentase: (99,07%)	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 12 Bulan	12 Bulan (100.00%)	
				2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan	12 Bulan (100.00%)	

				Anggaran: Rp. 549.397.351,00 Realisasi: Rp. 543.526.000,00 Persentase: (98,93%)	Perlengkapan) Kantor 12 Bulan		
			3)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Anggaran: Rp. 36.803.218,00 Realisasi: Rp. 36.679.795,00 Persentase: (99,66%)	Tersedianya peralatan Rumah Tangga 12 Bulan	12 Bulan (100.00%))	
			4)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Anggaran: Rp. 232.919.000,00 Realisasi: Rp. 212.678.518,00 Persentase: (91,31%)	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Bulan	12 Bulan (100.00%))	
		h	1)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Anggaran: Rp. 54.700.600,00 Realisasi: Rp. 54.145.600,00 Persentase: (98,99%)	tersedianya lap. perencanaan, panganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100 %	100 % (100.00%))

			an, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Nihil

C. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

	URUSAN PEMERINTAHAN	KBJK STRA.	PROGRAM DAN KEGIATAN	URAIAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	KOMUNIKASI & INFORMATIKA		a PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK, Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1) Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan Anggaran: Rp. 262.604.000,00 Realisasi: Rp. 262.540.500,00 Persentase: (99,98%)	Jumlah kegiatan literasi digital 11 kegiatan	11 kegiatan (100.00%)		
			b PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA, Kegiatan Pengelolaan	1) Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik Anggaran: Rp. 171.667.000,00 Realisasi:	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan	42 OPD, 12 Bulan (100.00%)		

			E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kab upaten/Kota	Rp. 163.529.806,00 Persentase: (95,26%)	Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik 42 OPD, "Jasa Fasilitator Non PNS Lomba Potensi Intanpari Lomba Jurnal Warga Perjalanan Dinas Pengadaan ATK dan konsumsi rapat" 12 Bulan		
			c . PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK, Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab upaten/Kota	1) Layanan Hubungan Media Anggaran: Rp. 714.640.300,00 Realisasi: Rp. 710.508.200,00 Persentase: (99,42%)	Jumlah Layanan Hubungan Media 1 Layanan, Terlaksananya Kerjasama dengan Media Massa, Cetak, Online dan TV 12 Bulan	1 Layanan, 12 Bulan (100.00%)	

				<p>2) Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah Anggaran: Rp. 203.821.600,00 Realisasi: Rp. 201.093.100,00 Persentase: (98,66%)</p>	<p>Terlaksananya liputan kegiatan pimpinan, klipping berita Karanganyar, Honor THL 12 Bulan, Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah 1 Dokumen</p>	<p>12 Bulan, 1 Dokumen (100.00%)</p>		
				<p>3) Monitoring Opini dan Aspirasi Publik Anggaran: Rp. 45.226.600,00 Realisasi: Rp. 45.040.600,00 Persentase: (99,59%)</p>	<p>Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 1 Dokumen, Terlaksananya pengelolaan kamal aduan/ aspirasi publik 12 Bulan</p>	<p>1 Dokumen, 12 Bulan (100.00%)</p>		
				<p>4) Pelayanan Informasi Publik Anggaran:</p>	<p>Terlaksananya Rakor</p>	<p>12 Bulan, 1</p>		

				Rp. 103.336.000,00 Realisasi: Rp. 100.163.300,00 Persentase: (96,93%)	PPID, Monev, serta tertatanya website OPD dan BUMD 12 Bulan, Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik 1 Dokumen	Dokumen (100.00%)		
			d . PROGRAM APLIKASI IN FORMATIK A, Kegiatan Pengelolaan E- government di Lingkup Pemerintah Daerah Kab upaten/Kota	1) Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Anggaran: Rp. 100.000.000,00 Realisasi: Rp. 99.729.900,00 Persentase: (99,73%)	Jumlah Dokumen Hasil Penatal aksanaan dan Pengawasan E- Government dalam Penyel enggaraan Pemerintahan Daerah Kabu paten/Kota 1 Dokumen, Penyusunan dokumen arsitektur SPBE Pengelolaan ekosistem TIK 1 Paket	1 Dokumen , 1 Paket (100.00%)		
				2) Pengelolaan Government Chief Information Officer	Jumlah Dokumen	1 Dokumen		

				(GCIO) Anggaran: Rp. 10.000.000,00 Realisasi: Rp. 9.990.000,00 Persentase: (99,90%)	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) 1 Dokumen, Pelatihan SPBE GCIO Pelatihan GCIO Perangkat Daerah 1 kegiatan	, 1 kegiatan (100.00%)		
			e PROGRAM INFORMASI DAN KOMU NIKASI PUBLIK, Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab upaten/Kota	1) Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik Anggaran: Rp. 725.537.000,00 Realisasi: Rp. 719.859.000,00 Persentase: (99,22%)	Jumlah konten informasi yang diproduksi dan disebarkan 23 Video	23 Video (100.00%)		
				2) Pengelolaan Media Komunikasi Publik Anggaran: Rp. 694.713.000,00 Realisasi: Rp. 691.289.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media	1 Dokumen , 12 Bulan (100.00%)		

			Persentase: (99,51%)	Komunikasi Publik 1 Dokumen, Tersedianya informasi pada masyarakat 12 Bulan		
		f. PROGRAM APLIKASI IN FORMATIK A, Kegiatan Pengelolaan E- government di Lingkup Pemerintah Daerah Kab upaten/Kota	1) Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah Anggaran: Rp. 96.000.000,00 Realisasi: Rp. 90.000.000,00 Persentase: (93,75%)	Sewa Bandwidth Sewa Metronet Sewa DRC Sewa Cloud Semarak Pengadaan Server dan peralatan pendukung ruang server Sewa Tower Repeater 1 paket, Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola 42 Opd	1 paket, 42 Opd (100.00%)	
			2) Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik Anggaran: Rp. 50.000.000,00	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 aplikasi, 1 paket (100.00%)	

				<p>Realisasi: Rp. 50.000.000,00 Persentase: (100,00%)</p>	<p>yang Dikembangkan 1 aplikasi, " Pengembangan aplikasi Desa Pengembangan aplikasi Investasi Pembuatan aplikasi Informasi Daerah Pengembangan website Pemerintah Kabupaten Karanganyar" 1 paket</p>		
			3)	<p>Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas Anggaran: Rp. 197.837.700,00 Realisasi: Rp. 195.632.700,00 Persentase: (98,89%)</p>	<p>Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City 1 Dokumen, "Pengadaan Server cctv Pengadaan CCTV Pemasangan</p>	<p>1 Dokumen , 1 paket (100.00%)</p>	

					akses point Study Tiru Pe ngembangan Smart City" 1 paket		
			4)	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Anggaran: Rp. 219.880.000,00 Realisasi: Rp. 214.412.000,00 Persentase: (97,51%)	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembang an dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 1 Dokumen, Penataan ruang server Jasa Fasilitator Non PNS Operasional Kegiatan Videotron License Zoom Pengadaan Router Mikrotik High Spec Pengadaan Komputer Pelatihan 12	1 Dokumen , 12 Bulan (100.00%)	

				Bulan			
			g PROGRAM . INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK, Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1) Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik Anggaran: Rp. 22.100.000,00 Realisasi: Rp. 22.094.250,00 Persentase: (99,97%)	Terlaksananya penanganan masalah menara telekomunikasi dan pendataan menara telekomunikasi 17 Kecamatan	17 Kecamatan (100.00%)	
				2) Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Anggaran: Rp. 335.000.000,00 Realisasi: Rp. 320.515.000,00 Persentase: (95,68%)	tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yaitu hibah, Laptop, 100 %	100 % (100.00%)	
				3) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas Anggaran: Rp. 372.455.000,00	Jumlah kelompok kehumasan yang dikelola 26 Kelompok	26 Kelompok (100.00%)	

				Realisasi: Rp. 371.837.700,00 Persentase: (99,83%)			
		h	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA, Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1) Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Anggaran: Rp. 1.756.300.000,00 Realisasi: Rp. 1.738.445.250,00 Persentase: (98,98%)	Jasa Fasilitator Non PNS Pembanguna n FO Pemeliharaan FO Pemeliharaan perangkat IT dan jaringan	12 Bulan, 1 Unit (100.00%)	
		i.	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA, Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1) Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Anggaran: Rp. 130.000.000,00 Realisasi: Rp. 129.990.000,00 Persentase: (99,99%)	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	12 Bulan, 12 Bulan (100.00%)	"Penge mbangan

					aplikasi perkantoran elektronik Pelatihan admin surat OPD Pengembangan aplikasi Satu Data Pengembangan aplikasi "Layangmas" 12 Bulan		
2	STATISTIK	a	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL, Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1) Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah Anggaran: Rp. 137.200.000,00 Realisasi: Rp. 137.200.000,00 Persentase: (100,00%)	Tersedianya Data Statistik Sektoral yang dihimpun berupa buku Karangnyar Dalam Angka dan Kecamatan Dalam Angka 2 Buku	2 Buku (100.00%)	
3	PERSANDIAN	a	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	1) Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Anggaran: Rp. 142.951.000,00 Realisasi: Rp. 136.395.781,00	Terlaksananya keamanan informasi berbasis elektronik dan non elektronik dengan tersedianya lisensi firewall	12 Bulan (100.00%)	

			Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase: (95,41%)	12 Bulan			
--	--	--	---	----------------------	----------	--	--	--

D. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Nihil

E. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

Nihil

F. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Nihil

G. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

Nihil

H. UNSUR KEWILAYAHAN

Nihil

I. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

Nihil

J. UNSUR KEKHUSUSAN

Nihil

BAB V
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN
PENUGASAN

- NIHIL -

BAB VI
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

- NIHIL -

BAB VII
INOVASI DAN PENGHARGAAN

A. INOVASI

Inovasi yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah pada tahun anggaran 2023

No	Nama Inovasi	OPD (Inovator)	Diskripsi Inovasi
1	2	3	4
1	Smart SAKIP	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sistem pelaporan kinerja pemerintah

B. PENGHARGAAN

Penghargaan yang dicapai pada tahun 2023 yang dilaporkan oleh Organisasi Perangkat Daerah.

No	Nama Penghargaan	Diskripsi	Pemberi Penghargaan
1	2	3	4
1	Baznas Award kategori Bupati pendukung utama pengelolaan Zakat	Penganugrahan Baznas Award kategori Bupati pendukung utama pengelolaan Zakat.	Baznas
2	Juara Lomba Film Pendek Komunitas Informasi Masyarakat (KIM)	Harapan 2 Tingkat Jawa Tengah, Lomba Film Pendek Komunitas Informasi Masyarakat (KIM)	Provinsi Jawa Tengah
3	Juara Lomba Film Pendek Komunitas Informasi Masyarakat (KIM)	Harapan 1 Tingkat Jawa Tengah, Lomba Film Pendek Komunitas Informasi Masyarakat	Provinsi Jawa Tengah

		(KIM)	
4	Juara Lomba Film Pendek Komunitas Informasi Masyarakat (KIM)	Juara Lomba Film Pendek Komunitas Informasi Masyarakat (KIM)	Provinsi Jawa Tengah
5	Juara Lomba Pertunjukan Rakyat Forum Komunikasi Media Tradisional (FK-METRA)	Harapan 1 Tingkat Jawa Tengah, Lomba Pertunjukan Rakyat Forum Komunikasi Media Tradisional (FK-METRA)	Provinsi Jawa Tengah
6	penghargaan Cantik (Cinta Statistik)	Desa Sroyo mendapatkan penghargaan sebagai salah satu desa Cantik (Cinta Statistik) terbaik se provinsi Jawa Tengah	Kepala BPS

BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pelaksanaan tugas dan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2023 pada umumnya program kerja telah dapat dilaksanakan dengan baik melalui berbagai kegiatan berdasarkan petunjuk dan arahan. Dinas Komunikasi dan Informatika telah melaksanakan berbagai pelayanan di bidang Komunikasi dan Informatika dengan capaian target anggaran 95,49%.

B. SARAN

Dunia Teknologi Informasi dan Komunikasi, perkembangan dan perubahannya berjalan sangat cepat, sehingga harus senantiasa diantisipasi dan diikuti secara sungguh-sungguh.

Disadari masih banyak permasalahan-permasalahan yang timbul baik secara internal maupun secara eksternal dan pelayanan masih perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, adapun beberapa saran sebagai berikut :

1. Perlunya desain visual website yang menarik dikarenakan perkembangan media digital yang kini lebih sering diakses masyarakat untuk mendapatkan informasi.
2. Perlunya mengembangkan aplikasi sistem informasi manajemen yang terpadu dan berkesinambungan untuk lebih meningkatkan pelayanan publik.
3. Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana, prasarana dibidang komunikasi dan informatika. Misalnya peningkatan kapasitas bandwidth, pembangunan infrastruktur informasi dan komunikasi di Kabupaten Karanganyar

4. Perlunya Peningkatan kualitas, kompetensi, kinerja dan produktivitas SDM yang profesional melalui berbagai bimbingan teknis, seminar, *capacity building* dan diklat sesuai kompetensi yang dibutuhkan dibidang Statistik, Persandian, Komunikasi dan Informatika.

Demikian LPT ini disusun untuk memberikan informasi pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar pada Tahun Anggaran 2023 serta sebagai upaya perbaikan kesinambungan untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.

Karanganyar, Desember 2023

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Karanganyar



ISNAN NUR AZIZ, S.Kom

Pembina

NIP. 19780210 200501 1 016